

**PERAN *INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC)* DALAM
PENANGGULANGAN KORBAN KONFLIK BERSENJATA
PADA MASA INVASI RUSIA-UKRAINA**

Oleh: Rizka Nur Fadilah Pulungan

Pembimbing: Tuah Kalti Takwa, S.H., M.H

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran *International Committee of the Red Cross (ICRC)* dalam menangani korban konflik bersenjata selama invasi Rusia terhadap Ukraina pada 2022-2023. Invasi tersebut menimbulkan krisis kemanusiaan yang ditandai dengan meningkatnya korban sipil, gelombang pengungsian, serta pelanggaran hukum humaniter internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi pustaka dan analisis dokumen resmi ICRC, laporan PBB, serta sumber relevan lainnya. Kerangka teori yang digunakan adalah perspektif pluralisme dan teori organisasi internasional Clive Archer untuk menjelaskan posisi ICRC sebagai aktor independen dalam norma, sosialisasi, serta fungsi operasional kemanusiaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICRC melakukan evakuasi sipil, distribusi bantuan, penyediaan layanan kesehatan, dan kunjungan terhadap tawanan perang. Namun, ICRC menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses, risiko keamanan, serta resistensi pihak berkonflik. Penelitian ini menegaskan pentingnya dukungan internasional untuk memperkuat kapasitas ICRC dalam memastikan perlindungan kemanusiaan selama konflik Rusia-Ukraina.

Kata Kunci: Konflik Bersenjata, ICRC, Invasi, Rusia, Ukraina.

ABSTRACT

The study discussed the role of the International Committee of the Red Cross (ICRC) in handling victims of armed conflict during the Russian invasion of Ukraine in 2022-2023. The invasion generated a humanitarian crisis characterized by increasing civil casualties, waves of refugees, and violation of international humanitarian laws. The research methods used are qualitative descriptive results in library studies and official document analysis of icrc, the UN report, and other relevant sources. The framework of the theory used is the perspective of pluralism and the theory of the international organization Clive Archer to explain the position of icrc as an independent actor in the norms, socialization, and operational functions of humanity. Studies have shown that icrc carried out civil evacuations, relief distribution, provision of health services, and visits on prisoners of war. However, icrc faces challenges of limited access, security risk, and conflict resistance. The study highlights the importance of international support to strengthen the capacity of icrc to ensure humanitarian protection during the russian-ukrainian conflict.

Keywords: Armed Conflict, ICRC, Invasion, Russia, Ukraine.

PENDAHULUAN

Dalam hubungan internasional, setiap konflik memiliki latar belakang yang berbeda. Melalui latar belakang tersebut dapat dijadikan sebagai landasan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan para aktor dalam penyelesaian konflik. Pada dasarnya setiap konflik berkaitan dengan power, baik secara langsung maupun tidak langsung. Konflik seringkali dijadikan cara untuk mencari atau mempertahankan keseimbangan atau ketidakseimbangan power dalam hubungan.¹

Kesamaan sejarah dimana Rusia dan Ukraina terlahir di wilayah yang sama tentunya memiliki hubungan erat. Meskipun sejarah mencerminkan hubungan yang erat antara Rusia dan Ukraina, pada kenyataannya kedua negara tersebut tidak terlepas dari berbagai konflik. Ukraina sejak lama menginginkan kedaulatan penuh sebagai negara merdeka. Keinginan tersebut terwujud pada tahun 1991 ketika Majelis Tertinggi Ukraina mendeklarasikan kemerdekaan, yang kemudian mendapat dukungan mayoritas rakyat melalui referendum pada tahun yang sama.² Meski Ukraina telah menjadi negara yang merdeka, tantangan baru juga muncul yang membawa isu politik dan diplomatik.

Krisis antara Rusia dan Ukraina dimulai pada 2014 yang mana kedua negara melakukan perang cyber. Diduga bahwa Rusia mengambil wilayah Krimea secara paksa melalui serangan cyber. Selain itu, ada juga penolakan supremasi yang

dijalankan oleh Rusia. Isu masuknya Ukraina ke *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) sebagai keanggotaan, tentunya akan menjadi ancaman bagi keamanan nasional Rusia.³ Invasi yang dilakukan oleh Rusia pun dilancarkan pada tanggal 24 Februari

2022 terhadap Ukraina. Sejak dimulainya serangan bersenjata besar-besaran oleh Federasi Rusia, hingga 24 September 2023, OHCHR mencatat 27.449 korban sipil di negara Ukraina.⁴ Guna melindungi masyarakat sipil, Konvensi Jenewa hadir dalam memberikan aturan terhadap perlindungan kemanusiaan pada masa konflik bersenjata. Dalam Konvensi Jenewa 1949 terdapat perlindungan individu secara umum yang tertuang pada pasal 3, diterangkan bahwa bagi orang-orang yang tidak mengambil bagian aktif dalam permusuhan, termasuk kombatan yang tidak dapat lagi melanjutkan pertempuran, maka semuanya harus diperlakukan secara manusiawi, tanpa pembedaan yang merugikan berdasarkan ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, kelahiran atau kekayaan, atau kriteria serupa lainnya.⁵

Analisis lapangan dari wilayah Chernihiv (Denysenko & Shamruk, 2024) menunjukkan bahwa berbagai

¹ Morton Deutsch, Peter T. Coleman, and Eric C. Marcus, *The Handbook of Conflict Resolution Theory and Practice, Politics and Society in Israel*, vol. 2 (USA: Jossey-Bass, 2006), <https://doi.org/10.4324/9781315126838-7>.

² J K b Lough, Rex Goad, and Klaus Niemeyer, "History of the Ukraine," *Books Abroad*, 2022, <https://doi.org/10.2307/40082719>.

³ Morton Deutsch, Peter T. Coleman, and Eric C. Marcus, *The Handbook of Conflict Resolution Theory and Practice, Politics and Society in Israel*, vol. 2 (USA: Jossey-Bass, 2006), <https://doi.org/10.4324/9781315126838-7>.

⁴ UNHCR, "Civilian Casualties in Ukraine," *United Nations High Commissioner for Refugees*, vol. 38, 2022, <https://www.OHCHR.org/en/news/2022/10/ukraine-civilian-casualty-update-3-October-2022>.

⁵ ICRC, "The Geneva Conventions of 12 August 1949," *Geneva Conventions* (1949).

serangan langsung dilakukan terhadap rumah penduduk, rute evakuasi sipil, panti sosial dan fasilitas perawatan jangka panjang, serta infrastruktur non-militer. Tindakan ini secara jelas melanggar ketentuan hukum humaniter internasional, khususnya Pasal 16 GC IV yang mengatur perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti orang sakit, lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan hamil. Selain itu, serangan tersebut bertentangan dengan Pasal 18 GC IV yang menegaskan bahwa fasilitas medis dan sipil tidak boleh diserang, serta Pasal 28 GC IV yang melarang penggunaan warga sipil sebagai tameng perang. Serangan terhadap fasilitas sosial ini juga menunjukkan pola serangan tanpa pembedaan (*indiscriminate attacks*) yang melanggar prinsip distinction dan proportionality dalam IHL.⁶

Selain itu, tindakan tersebut juga melanggar ketentuan dalam Protokol Tambahan I Pasal 12–15 yang menegaskan kewajiban pihak bertikai untuk menghormati dan melindungi layanan medis tanpa pengecualian. Akibat lanjutan dari serangan tersebut, seperti terputusnya akses listrik, medis, dan makanan, telah menyebabkan kematian puluhan pasien lansia. Dalam konteks IHL, hal ini dipandang sebagai akibat langsung dari kegagalan pihak pendudukan dalam memenuhi kewajiban melindungi populasi rentan.⁷

ICRC sebagai INGO juga sering dipertanyakan terkait netralitasnya dalam menjalankan tugasnya. ICRC menganggap penghormatan terhadap berbagai tugas

yang tersirat dalam netralitas sebagai hal yang penting untuk mempertahankan status dan fungsinya. Begitu juga pada konflik Rusia-Ukraina yang sempat menggemparkan dunia. ICRC sebagai organisasi netral dan juga promotor sekaligus pengawas dari hukum humaniter internasional tentunya melaksanakan tanggung jawabnya selama invasi ini. Pada 15 dan 18 Maret, ICRC membantu evakuasi warga sipil untuk keluar dari wilayah yang sedang berperang menuju kota Ukraina lainnya yakni Lubny, dengan menggunakan bus yang telah difasilitasi oleh ICRC.

Tingginya jumlah korban yang ditimbulkan oleh konflik, baik yang mengalami luka, menjadi pengungsi, hingga kehilangan nyawa, tentunya membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana peran *International Committee of the Red Cross* (ICRC) dalam penanganan korban konflik bersenjata. Serta juga melihat peran dan netralitas ICRC sebagai pengawas atas implementasi sumber hukum humaniter internasional. Keterbatasan informasi terkait korban sipil di Rusia yang ditangani oleh ICRC tentu menjadi pertanyaan terkait imparial ICRC dalam menjalankan tugasnya.

KERANGKA TEORI

Perspektif Pluralisme

Dalam penelitian yang berjudul “*Peran International Committee of the Red Cross* (ICRC) Dalam Penanganan Korban Konflik Bersenjata Pada Masa Invasi Rusia Terhadap Ukraina” ini, penulis menggunakan Perspektif Pluralisme. Para filsafat politik berpendapat bahwa orang-orang yang berbeda keyakinan, latar belakang, dan gaya hidup dapat hidup berdampingan

⁶ Denysenko, K. V., & Shamruk, N. B. (2024). Violation of the Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War by the Russian Federation.

⁷ Fokin, Y. F. (2024). Responsibility for violations of international humanitarian law during Russian military aggression, 4(17), 290–299

dalam masyarakat yang sama dan berpartisipasi secara setara dalam proses politik.

Menurut Isaiah menjunjung kebebasan merupakan hal yang paling berharga karena memberikan peluang bagi individu untuk membentuk kehidupan mereka melalui pilihan radikal. Dapat disimpulkan bahwa pluralism merupakan perspektif yang fokus terhadap keberagaman aktor dan non aktor dalam sebuah hubungan internasional. Pluralisme memiliki 4 asumsi dasar yaitu:⁸

- a) Aktor non negara merupakan kenyataan penting dalam hubungan internasional.
- b) Negara bukan aktor tunggal
- c) Negara bukan aktor yang rasional,
- d) Isu internasional bukan hanya seputaran militer dan security.

Teori Organisasi Internasional

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori organisasi internasional dan menggunakan pemikiran dari Clive Archer. Clive Archer membagi organisasi internasional menjadi 2 keutamaan yakni *Non-Governmental Organization* (NGO) dan *International Governmental Organization* (IGO). Selain itu, Archer berpendapat bahwa ada 3 peran utama dari organisasi internasional yakni sebagai instrumen, arena dan aktor. Peran sebagai instrumen yakni adanya tujuan untuk dicapai sedangkan peran sebagai arena berarti OI akan dijadikan sebagai tempat diskusi seperti forum. Kemudian peran sebagai aktor yakni OI merupakan aktor yang independen dan bebas bertindak tanpa dipengaruhi pihak eksternal.

ICRC dapat dikatakan berperan sebagai aktor sebab segala tindakan kemanusiaan yang dilakukan oleh ICRC tidak

dipengaruhi oleh pihak manapun dan tidak memihak siapapun kecuali HAM dari setiap individu. Menurut Archer era informasi membawa tantangan baru bagi organisasi internasional. Teknologi baru seperti internet dan konferensi video menawarkan forum baru bagi kelompok untuk berkomunikasi serta meningkatnya tekanan pada sumber daya dunia dan berlanjutnya ketidakamanan di seluruh dunia akan menekankan perlunya organisasi internasional. ICRC juga ikut serta dalam memberikan upaya penanganan terkait isu krisis kemanusiaan yang masih terjadi di Rusia dan di Ukraina. Maka dari itu teori Clive Archer dijadikan sebagai landasan berpikir dalam penelitian karena mampu menggambarkan peran ICRC dalam menangani isu kemanusiaan.

Level Analisis

Tingkat Analisis pada penelitian ini ialah kelompok dengan unit Analisis INGO. *International Committee of the Red Cross* (ICRC) dijadikan oleh penulis sebagai aktor utama dalam penelitian ini agar penelitian ini mengerucut dan lebih fokus. Peran dari ICRC akan disorot serta tindakan-tindakan dilakukan oleh ICRC dalam penanganan korban konflik bersenjata yang terjadi saat Rusia menginvasi Ukraina.

METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis data, penulis mendalami data-data yang dikumpulkan, melalui penelusuran literatur agar dapat memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang diajukan. Informasi dipilah dan disusun secara terstruktur untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian. Teknik analisis yang digunakan penulis ialah teknik analisis kualitatif yang

⁸ M Saeri, "Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik," *Jurnal Transnasional* 3, no. 2 (2012): 1–19, <https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/ITS/article/viewFile/70/64>.

mana cenderung bersifat deskriptif. Lalu setelah menganalisis data maka penulis dapat melihat fakta empiris dan mempelajari isu yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Konflik Rusia-Ukraina

Hubungan antara Rusia dan Ukraina memiliki latar belakang sejarah yang panjang. Kedua Negara ini terikat pada periode Uni Soviet dalam sejarahnya. Rusia merupakan sebuah negara federasi yang berdaulat dan memiliki luas wilayah terbesar di dunia baik pada masa Uni Soviet maupun sesudahnya.

Selain pengaruh politik, hubungan Rusia dan Ukraina di masa Uni Soviet juga dipengaruhi oleh hubungan ekonomi dan militer. Uni Soviet menerapkan ekonomi terpusat yang mengintegrasikan ekonomi Rusia dan Ukraina, termasuk sektor industri berat seperti baja, pertambangan, dan manufaktur militer. Selain itu, Ukraina juga memainkan peran penting dalam sektor agrikultur, menyediakan gandum dan produk pertanian untuk mendukung ekonomi Uni Soviet. Selain sektor industri, energi juga menjadi komponen penting dalam hubungan Rusia dan Ukraina. Sebagai salah satu produsen gas alam terbesar di dunia, Rusia memasok sebagian besar kebutuhan energi Ukraina melalui jaringan pipa gas seperti *Nord Stream* dan *Brotherhood Pipeline*. Ketergantungan Ukraina pada energi Rusia sering digunakan sebagai alat tekanan politik, terutama saat terjadi ketegangan diplomatik antara kedua negara.

Namun, kedua negara ini memiliki perbedaan ideologi yang memicu terjadinya perang dingin. Pada paruh waktu tahun 1980, Uni Soviet mengalami krisis ekonomi dan politik yang disebabkan oleh tingginya jumlah korupsi dan rusaknya birokrasi. Bahkan budaya politik di Uni Soviet semakin monolitik dan

apatisme terhadap masyarakat semakin meningkat. Salah satu negara pecahan Uni Soviet yang mendeklarasikan kemerdekaannya adalah Ukraina pada tanggal 24 Agustus 1991. Karena Ukraina telah mendirikan negaranya sendiri, Rusia juga berupaya untuk melaksanakan hubungan diplomatik dengan Ukraina pada tanggal 14 Februari 1992. Rusia dan Ukraina mengirimkan duta besar negaranya sebagai bentuk hubungan diplomatik.⁹

Pada tanggal 14 Februari 1992, Ukraina mendeklarasikan kemerdekaannya dan mulai bergerak untuk memakmurkan negaranya dengan mendekatkan diri ke Negara barat seperti Eropa dan Amerika Serikat hingga ke organisasi militer internasional seperti NATO guna menjalin kerjasama dalam sisi keamanan internasional. Negara Ukraina memiliki potensi sebagai pemain utama dalam tatanan global yang akan menjadi garis depan persaingan kekuatan besar untuk mendominasi hubungan internasional.¹⁰

Hubungan erat antara Rusia dan Ukraina semakin memudar ketika Rusia mulai mengambil wilayah krimea secara paksa pada tahun 2014. Tindakan Rusia menarik perhatian dunia internasional terutama oleh NATO (*North Atlantic Treaty Organization*). Bentuk perebutan wilayah Krimea dianggap sebagai keinginan dari Rusia yang ingin menyatukan kembali Rusia dan Ukraina.

Selain Krimea, Rusia juga mendukung kelompok separatis di wilayah Donbas,

⁹ Ali Martin and Salman Al Farizi, "Sikap Uni Eropa Terhadap Konflik Rusia Dan Ukraina," *Jurnal Kajian Hubungan Internasional* 3, no. 1 (2024): 42–65, <https://komahi.uai.ac.id/peran-NATO-dalam-upaya-menangani-konflik-rusia-ukrainatahun->

¹⁰ Ibid.

Ukraina timur, yang memicu perang saudara yang hingga kini belum sepenuhnya berakhir. Selain itu, pengaruh media juga memainkan peran penting dalam memperburuk hubungan kedua negara. Rusia menggunakan propaganda media untuk memperkuat narasi politiknya dan memperlemah stabilitas internal Ukraina. Media Rusia sering kali menggambarkan pemerintah Ukraina sebagai boneka Barat dan menggunakan retorika nasionalis untuk membenarkan intervensi militer di wilayah Ukraina.

Dampak Konflik Terhadap Kehidupan Masyarakat

Pada awal serangan Rusia terhadap Ukraina, diperkirakan kurang lebih 1.335 warga sipil Ukraina menjadi korban, dengan 474 diantaranya meninggal dunia dan 861 lainnya mengalami luka-luka.¹¹ Serangan yang mengenai masyarakat sipil menjadi tanda bahwa adanya pelanggaran hukum humaniter. Hukum humaniter dibuat guna melindungi mereka yang terlibat. Perkembangan hukum konflik bersenjata menjadi hukum humaniter tentunya menunjukkan tujuan utamanya yakni melindungi para kombatan dan warga sipil dari penderitaan yang tidak perlu serta menjamin hak-hak dasar mereka yang jatuh ke tangan musuh. Di sisi militer, Ukraina melakukan pertahanan menggunakan 17 brigade yang masing-masing memiliki sekitar 4.000 tentara.

Wilayah Negara Ukraina yang memiliki jumlah korban sipil tertinggi yakni di Oblast Donetsk, Kharkiv, Kyiv, Kherson, dan Luhans. Berdasarkan laporan dari OHCHR terdapat 364 warga sipil meninggal, yang terdiri dari 74 laki-laki, 42 perempuan, 8 anak laki-laki, 4 anak

perempuan, serta 13 anak dan 223 orang dewasa yang jenis kelaminnya belum diketahui.¹² Selain itu, OHCHR juga mencatat adanya korban sipil di Negara Rusia, yakni sekitar 287 korban. Dengan rincian 58 diantaranya tewas, yang terdiri dari 30 laki-laki, 21 perempuan, 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan, serta 4 orang dewasa yang jenis kelaminnya tidak teridentifikasi.¹³

Sejak dimulainya invasi skala penuh dari Rusia terhadap ke Ukraina di tahun 2022, jutaan orang terpaksa meninggalkan negara tersebut untuk mencari perlindungan di Negara-negara tetangga seiring dengan meningkatnya konflik, negara-negara seperti Hongaria, Moldova, Polandia, Rumania, dan Slovakia menjadi tujuan utama bagi para pengungsi yang melarikan diri dari kekerasan. Di Hongaria, tercatat lebih dari 3,9 juta penyeberangan perbatasan hingga akhir Desember 2022. Kisaran 2 juta pengungsi meninggalkan wilayah berkonflik langsung dari Ukraina, sementara 1,9 juta lainnya melalui perbatasan Rumania.¹⁴

Hingga akhir tahun 2022, Negara Rumania memberikan status kepada 101.000 orang berdasarkan Temporary Protection Directive (TPD), yang mana memungkinkan bagi para pengungsi untuk dapat tinggal secara sah serta

¹² Reza Pahlevi, "Jumlah Korban Sipil Di Ukraina Akibat Invasi Rusia (5 Maret 2022)," 2022, <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/36b664fb20786da/pbb-korban-sipil-di-ukraina-capai-1123-orang-364-meninggal>.

¹³ UNHCR, "Civilian Casualties in Ukraine," United Nations High Commissioner for Refugees, vol. 38, 2022, <https://www.ohchr.org/en/news/2022/10/ukraine-civilian-casualty-update-3-october-2022>.

¹⁴ UNHCR, "Regional Refugee Response Plans," 2024, <https://doi.org/10.18356/9789213587089c024>.

¹¹ Yuanda Winaldi and Joko Setiyono, "Russian Conflict on Ukraine Based on Humanitarian Law Perspective," *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 18, no. 2 (2022): 252–63, <https://doi.org/10.14710/lr.v18i2.46679>.

dapat mengakses hak serta layanan penting lainnya.

Selain itu konflik yang terus berlangsung telah mengganggu hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan. Serangan langsung terhadap fasilitas pendidikan membuat kegiatan belajar mengajar terganggu. Pemerintah menggunakan system ajar daring sebagai solusi pemenuhan hak anak dalam pendidikan dalam masa berkonflik. Namun, banyak anak yang kesulitan mengikuti pembelajaran daring secara efektif karena keterbatasan pendapatan atau keberadaan keluarga dan kerusakan infrastruktur energi yang mempengaruhi pasokan listrik serta dalam mengakses internet. Kesehatan mental anak-anak di Ukraina dan Rusia juga ikut terkena dampaknya. Mereka menghadapi ketidakpastian, trauma, dan kecemasan akibat serangan udara serta hilangnya rutinitas yang normal.

Infrastruktur publik juga menjadi salah satu sektor yang mengalami akibat dari eskalasi konflik. Serangan militer bukan hanya mengarahkan ke asset militer lainnya, tetapi juga mengakibatkan kehancuran infrastruktur yang cukup signifikan terhadap jaringan transportasi, fasilitas publik, system energy, dan prasarana yang mendukung kehidupan masyarakat. Hancurnya jalan utama, jembatan, stasiun, hingga infrastruktur air dan listrik tentunya menghambat kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat di berbagai daerah.

Sejarah *International Committee of the Red Cross* (ICRC)

International Committee of the Red Cross (ICRC) adalah organisasi kemanusiaan netral dan independen yang dibentuk untuk melindungi kehidupan dan martabat korban konflik bersenjata serta memberikan bantuan kepada mereka. *International Committee of the Red Cross*

didirikan untuk merawat korban pertempuran di masa perang seperti bantuan penderitaan manusia secara umum.¹⁵ ICRC memiliki tujuh prinsip dasar diantaranya yakni kemanusiaan, imparialitas, netralitas, kemandirian, pelayanan sukarela, kesatuan, universalitas.¹⁶

Prinsip-prinsip ini membentuk kerangka etis dan operasional yang memastikan bahwa kegiatan kemanusiaan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dilakukan secara konsisten, terpercaya, dan efektif di seluruh dunia. ICRC dibentuk sebagai respon terhadap Henry Dunant terkait pengalamannya di pertempuran Solferino di pada 24 Juni 1859.

Mandat dan Eksistensi ICRC dalam Hukum Humaniter Internasional

International Committee of the Red Cross (ICRC) yang telah berdiri selama 162 tahun, memegang peran utama dalam menegakkan Konvensi Jenewa yang telah diratifikasi 196 negara. ICRC telah mendefinisikan misinya yakni sebagai organisasi yang tidak memihak, netral, dan mandiri yang misi kemanusiaannya berfokus pada perlindungan serta pemberian bantuan terhadap kehidupan dan martabat korban konflik bersenjata juga situasi kekerasan lainnya.¹⁷

Dengan posisi serta kepercayaan tersebut, ICRC bukan hanya hadir untuk memberikan bantuan di medan konflik,

¹⁵ "International committee Of the Red Cross," Britanica,

<https://www.britannica.com/topic/International-Committee-of-the-Red-Cross>. Diakses tanggal 16 Januari 2025

¹⁶ ICRC, "Our Fundamental Principles," ICRC, 2024, <https://www.ICRC.org/en/our-fundamental-principles>. Diakses pada tanggal 16 Januari 2025

¹⁷ ICRC, "The ICRC Its Mission and Work," 2009.

namun juga berupaya dalam menyesuaikan aturan kemanusiaan dengan tantangan baru dalam perang serta menjaga aturan tersebut tetap dipatuhi. Sejak pecahnya ketegangan di Krimea, Ukraina pada tahun 2014, ICRC mulai memainkan peran penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan perlindungan bagi korban konflik. Krisis ini bermula setelah peristiwa Euromaidan dan aneksasi Semenanjung Krimea oleh Federasi Rusia, yang kemudian memicu pertempuran antara pasukan pemerintah Ukraina dan kelompok separatis bersenjata di wilayah Donetsk dan Luhansk.¹⁸ Dalam konteks tersebut, ICRC menjadi salah satu organisasi internasional pertama yang mendapat izin untuk beroperasi di wilayah yang terdampak konflik bersenjata. Proses penerimaan ICRC di Rusia dan Ukraina didasarkan pada aturan hukum kemanusiaan internasional, khususnya Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977.¹⁹

Laporan tahunan ICRC mencatat bahwa lebih dari satu juta orang di Ukraina telah menerima bantuan langsung berupa makanan, obat-obatan, dan akses layanan dasar antara tahun 2015 hingga 2021.²⁰ Organisasi ini juga menjadi mediator penting dalam proses pertukaran tahanan antara pihak Ukraina dan kelompok bersenjata pro Rusia, yang dilakukan atas dasar kemanusiaan tanpa keterlibatan politik. Peran ini menegaskan posisi ICRC sebagai lembaga yang diakui oleh kedua belah pihak karena netralitas dan profesionalismenya.

Program Bantuan ICRC Dalam Penanganan Korban Konflik Bersenjata

¹⁸ Indriana Kartini, "THE RUSSIA' S ANNEXATION OF CRIMEA AND ITS CONSEQUENCES," 2014, 27-41.

¹⁹ ICRC, "The Geneva Conventions of 12 August 1949," Geneva Conventions § (1949).

²⁰ "Annual Report 2020," vol. 1, 2020.

Sejak pecahnya invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, International Committee of the Red Cross (ICRC) segera meningkatkan operasi kemanusiaannya di seluruh wilayah terdampak. Fokus utama ICRC adalah membantu warga sipil yang kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar, mendukung pelayanan kesehatan, serta memfasilitasi pemulihan infrastruktur penting.

ICRC menjalankan tanggung jawabnya sesuai mandat Konvensi Jenewa untuk melindungi korban konflik bersenjata dan menjamin penghormatan terhadap hukum humaniter internasional. ICRC melaksanakan program Water and Habitat, yaitu kegiatan untuk memperbaiki sistem air dan sanitasi yang rusak akibat pertempuran. Program ini mencakup restorasi dan perbaikan infrastruktur air minum, sanitasi, pemanas, pemasangan pompa dan generator, serta pemasangan tangki penyimpanan air sementara dan distribusi air oleh truk tangki di lokasi yang infrastrukturnya rusak.²¹

Program penting lainnya yakni Cash and Voucher Assistance yakni program bantuan tunai bekerja sama dengan Ukrainian Red Cross Society (URCS) dan Kementerian Kebijakan Sosial Ukraina. Program ini memberikan bantuan keuangan langsung kepada individu dan keluarga yang kehilangan penghasilan akibat konflik bersenjata, terutama mereka yang mengungsi atau berada di wilayah terdampak parah.²² Tujuan utama bantuan ini adalah agar penerima dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan, dan

²¹ ICRC, "Water and Habitat," 2016.

²² ICRC, "Cash and Voucher Assistance - Economic Security," International Committee of The Red Cross, 2020, 408.

tempat tinggal sementara secara mandiri. Bantuan kemanusiaan terus meningkat seiring eskalasi konflik Rusia-Ukraina yang memaksa ICRC untuk mulai memperluas kapasitas dan cakupan bantuannya. Pada awal invasi diluncurkan, ICRC telah menghadirkan hampir 800 staff yang ditempatkan beberapa kota seperti di Kyiv, Odessa, dan Lviv. Mereka bertugas dalam menyediakan bantuan seperti makanan, air bersih, obat-obatan, dan peralatan perlindungan.²³

Hingga akhir tahun 2022, total bantuan kemanusiaan yang diberikan sebanyak 14,5 juta orang dan 744.000 orang mendapatkan bantuan tunai senilai CHF 137 Juta.²⁴ Pada sektor tempat tinggal ICRC memberikan dukungan berupa perbaikan rumah hingga biaya sewa terhadap 1,8 juta orang dan lebih dari 1,4 juta orang menerima pemanas darurat.

Sementara, ranah perlindungan para pengungsi terdapat 10.500 orang yang dievakuasi melalui operasi jalur aman dan 16.000 orang mengikuti sosialisasi penyadaran akan bahaya senjata yang dilakukan oleh ICRC. Dalam sektor migrasi sebanyak 252.000 pengungsi dapat bantuan transportasi atau evakuasi serta tersedia 10 titik layanan kemanusiaan. Layanan kesehatan tentunya menjadi prioritas ICRC dalam menjalankan tugasnya, sepanjang tahun 2022 sebanyak 328.000 orang menerima bantuan terkait kesehatan mental. Guna memperluas cakupan bantuan, ICRC menyediakan unit kesehatan keliling yang dikerahkan di daerah-daerah yang sulit mengakses fasilitas kesehatan. Sebanyak 24.000 orang mendapatkan pelayanan kesehatan dari

unit kesehatan keliling yang menjangkau daerah terpencil, serta dari fasilitas kesehatan yang sudah diperbaiki.

Kritik ICRC terhadap Kekejaman Rusia pada Ukraina

Walaupun bersifat netral, ICRC beberapa kali menyampaikan kritik terhadap tindakan Rusia selama konflik. Salah satu isu utama adalah penolakan akses bagi ICRC untuk memantau tawanan perang (POW) Ukraina, yang merupakan pelanggaran Pasal 126 Konvensi Jenewa III. Kondisi ini menghalangi pengawasan independen terhadap perlakuan POW. ICRC juga mengecam serangan Rusia terhadap infrastruktur sipil dan fasilitas medis yang dinilai “*cannot be justified under IHL*”. Serangan tersebut melanggar prinsip dasar hukum humaniter internasional, terutama kewajiban melindungi objek sipil. Selain itu, ICRC menyoroti deportasi dan evakuasi paksa anak-anak dari wilayah pendudukan Ukraina, yang melanggar Pasal 49 Konvensi Jenewa IV. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap perlindungan penduduk sipil. Secara keseluruhan, ICRC menegaskan bahwa pola kekerasan Rusia termasuk *serious violations* atau *grave breaches*, seperti pembunuhan disengaja (*wilful killing*), penyiksaan, pemberian penderitaan berat secara sengaja, serta penghancuran luas terhadap properti tanpa dasar militer yang sah.²⁵

Tantangan ICRC dalam Menjalankan Mandat Kemanusiaan

²³ Putri Safinatun Najjah Nurul Uswatul Hasanah Siregar, “Analysis of the ICRC’s Role in the Ukraine-Russia Conflict: Humanitarian Aid and Civilian Security in the Midst of War,” 2024, 650-58.

²⁴ Red Cross and Red Crescent, op.cit., 6

²⁵ International Committee of the Red Cross (ICRC). (2022–2024). Statements on Ukraine regarding protection of civilians, POW treatment, and IHL violations. (Sumber publik ICRC).

Tantangan ICRC dalam menjalankan mandat kemanusiaannya sangatlah kompleks dan beragam. Sebagai organisasi kemanusiaan internasional yang bertugas dalam melindungi dan membantu para korban konflik bersenjata juga mengalami hambatan, baik dari keadaan di lapangan, urusan politik, maupun keterbatasan dana. Kondisi konflik yang semakin memanas seringkali membatasi pergerakan ICRC di lapangan.

Terutama dalam memastikan akses terhadap populasi sipil dan tawanan perang yang di lindungi oleh HHI. ICRC tidak selalu diizinkan untuk berkomunikasi secara langsung dengan tawanan perang. Sehingga sulit bagi ICRC dalam memastikan apakah para tawanan diperlakukan sesuai aturan Konvensi Jenewa serta perlindungan yang layak. Agar mencapai tawanan perang, ICRC harus bernegosiasi dengan kedua pihak yang berkonflik dan bergerak sebagai pihak yang netral. Namun, karena ketegangan politik tentunya rasa saling tidak percaya tertanam selama masa berkonflik, sehingga ICRC tidak selalu diizinkan memeriksa keadaan tawanan perang.²⁶

Peristiwa ledakan barak penjara di Olenka yang terjadi pada 29 Juli 2022, dimana 50 tawanan perang Ukraina tewas dan lebih 150 lainnya terluka.²⁷ Pada akun resmi kementerian luar negeri Ukraina

menyatakan bahwa ICRC tidak pernah diberi izin masuk, meskipun para tawanan perang telah didaftarkan oleh mereka saat mereka menyerahkan diri di Mariupol. Direktur Jenderal ICRC saat itu yakni Robert Mardini memberi pernyataan kepada wartawan di Kyiv bahwa ICRC telah melakukan negosiasi dengan Rusia secara intens, namun belum diberikan akses untuk mengunjungi tawanan perang dan juga tidak menjamin keamanan ketika kunjungan dilakukan.²⁸

KESIMPULAN

Dalam situasi yang cukup krisis, International Committee of the Red Cross (ICRC) hadir sebagai salah satu organisasi kemanusiaan yang independen memberikan pengaruhnya kepada korban konflik bersenjata di Ukraina. ICRC diberikan kepercayaan oleh negara-negara di dunia internasional untuk menjadi pengawas pada hukum humaniter internasional, maka dari itu prinsip netral ICRC dapat menjadi media dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan di tengah perang yang aktif.

Selama 2022 hingga 2023, ICRC berhasil meningkatkan kuantitas bantuannya secara signifikan yang berhasil menjangkau jutaan korban konflik bersenjata melalui penyediaan bantuan dasar walaupun akses dalam penyaluran bantuan terbatas. Kehadiran ICRC hanya bisa efektif ketika kondisi politik, keamanan, dan dukungan internasional terjamin sehingga ruang

²⁶ Pierre Kraehenbuehl, "Contemporary Challenges to International Humanitarian Law: The ICRC Perspective," Russia In Global Affairs, 2024, <https://eng.globalaffairs.ru/articles/icrc-perspective-kraehenbuehl/>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2025

²⁷ Yulia Gorbunova and Kseniya Kvitka, "One Year Since Death of Ukrainian POWs in Explosion," Human Rights Watch, 2023, <https://www.hrw.org/news/2023/07/28/one-year-death-ukrainian-pows-explosion>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2025

²⁸ Reuters, "Red Cross Denied Access to Prisoners at Russian-Held Olenivka despite 'intense' Talks -ICRC Chief," Euronews, 2022, <https://www.euronews.com/2022/09/02/ukraine-crisis-red-cross-prisoners>. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2025

gerak ICRC akan lebih luas. Fleksibilitas dari ICRC juga terlihat ketika melakukan bantuan saat Bendungan Nova Kakhovka runtuh, ICRC langsung merespon dan memberikan bantuan ke wilayah yang terkena dampak banjir. Prinsip netralnya menjadi kekuatan utama sehingga memungkinkan ICRC dapat menjangkau lokasi-lokasi yang sulit diakses oleh organisasi kemanusiaan lainnya. Keberhasilan ICRC pada konflik Rusia-Ukraina bukan hanya terletak pada besarnya bantuan yang disalurkan, namun juga kemampuannya dalam menjaga hukum humaniter internasional di tengah kekacauan konflik. Dengan demikian, ICRC tetap menjadi aktor yang penting dalam isu kemanusiaan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Annual Report 2020," vol. 1, 2020.
- Archer, Clive. *International Organization*. Third edit., 2001. https://www.academia.edu/7429592/176633096_International_organizations.
- Denysenko, K. V ., & Shamruk, N. B. (2024). Violation of the Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War by the Russian Federation.
- Fokin, Y . F. (2024). Responsibility for violations of international humanitarian law during Russian military aggression, 4(17), 290-299.
- ICRC, "Cash and Voucher Assistance - Economic Security," International Committee of The Red Cross, 2020/408
- ICRC, "ICRC Ukraine", 2023.
- ICRC, "Our Fundamental Principles," ICRC, 2024, <https://www.ICRC.org/en/our-fundamental-principles>. Diakses pada tanggal 16 Januari 2025
- ICRC, "The ICRC Its Mission and Work," 2009.
- ICRC, "The Geneva Conventions of 12 August 1949," Geneva Conventions § (1949).
- ICRC, "Water and Habitat," 2016.
- Indriana Kartini, "THE RUSSIA' S ANNEXATION OF CRIMEA AND ITS CONSEQUENCES," 2014, 27-41.
- International Committee of the Red Cross (ICRC). (2022–2024). Statements on Ukraine regarding protection of civilians, POW treatment, and IHL violations. (Sumber publik ICRC).
- br"International committee Of the Red Cross," Britanica, <https://www.britannica.com/topic/International-Committee-of-the-Red-Cross>.
- J K b Lough, Rex Goad, and Klaus Niemeyer, "History of the Ukraine," Book: Abroad. 2022. <https://doi.org/10.2307/40082719>.
- Morton Deutsch, Peter T. Coleman, and Eric C. Marcus, *The Handbook of Conflict Resolution Theory and Practice, Politics and Society in Israel*, vol. 2 (USA: Jossey-Bass, 2006), <https://doi.org/10.4324/9781315126838-7>
- M Saeri, "Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik," Jurnal Transnasional 3, no. 2 (2012): 1–19, <https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/viewFile/70/64>.
- Pierre Kraehenbuehl, "Contemporary Challenges to International Humanitarian Law: The ICRC Perspective," Russia In Global Affairs, 2024, <https://eng.globalaffairs.ru/articles/icrc-perspective-kraehenbuehl/>.

- Putri Safinatun Najjah Nurul Uswatul Hasanah Siregar, "Analysis of the ICRC's Role in the Ukraine-Russia Conflict: Humanitarian Aid and Civilian Security in the Midst of War," 2024, 650-58.
- Red Cross and Red Crescent, "The Russia - Ukraine International Armed Conflict: One Year of the Global," 2023.
- Reuters, "Red Cross Denied Access to Prisoners at Russian-Held Olenivka despite 'intense' Talks -ICRC Chief," Euronews, 2022, <https://www.euronews.com/2022/09/02/ukraine-crisis-red-cross-prisoners>. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2025
- Reza Pahlevi, "Jumlah Korban Sipil Di Ukraina Akibat Invasi Rusia (5 Maret 2022)," 2022, <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/36b664fb20786da/pbb-korban-sipil-di-ukraina-capai-1123-orang-364-meninggal>.
- UNHCR, "Regional Refugee Response Plans," 2024, <https://doi.org/10.18356/9789213587089c02>
- UNHCR, "Civilian Casualties in Ukraine," United Nations High Commissioner for Refugees, vol. 38, 2022, <https://www.ohchr.org/en/news/2022/10/ukraine-civilian-casualty-update-3-october-2022>.
- Yulia Gorbunova and Kseniya Kvitka, "One Year Since Death of Ukrainian POWs in Explosion," Human Rights Watch, 2023, <https://www.hrw.org/news/2023/07/28/one-year-death-ukrainian-pows-explosion>.